

**Judul** : RI Siapkan Mitigasi untuk Jemaah Haji  
**Tanggal** : Kamis, 12 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-15

# RI Siapkan Mitigasi untuk Jemaah Haji

Mengantisipasi berbagai kemungkinan serangan AS-Israel ke Iran, pemerintah menyiapkan mitigasi risiko pada penyelenggaraan ibadah haji.

**JAKARTA, KOMPAS** — Eskalasi konflik di Timur Tengah belum bisa diprediksi dan dikhawatirkan berpengaruh pada penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario mitigasi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (11/3/2026), di Jakarta, mengatakan, ruang udara sejumlah negara Timur Tengah ditutup. Penutupan itu dampak serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran dan pembalasan Iran.

Sejauh ini dampaknya bagi Indonesia, antara lain, berupa gangguan perjalanan jemaah umrah. Ada kekhawatiran, ibadah haji tahun ini juga akan terimbas.

Hingga Rabu, AS-Israel ma-

**>> BACA JUGA:**

**Nestapa Warga Iran**  
Tanda-tanda babak akhir perang Iran melawan AS dan Israel belum terlihat.

**KOMPAS.ID**

[komp.as/nestapawarga](http://komp.as/nestapawarga)

BACA JUGA **HLM 4**

sih terus menyasar berbagai lokasi di Iran. Iran membalas dengan menyasar berbagai fasilitas milik AS dan penunjang fasilitas itu di Timur Tengah.

Rabu pagi, Arab Saudi mencegat lima pesawat nirawak Iran yang mengarah ke ladang minyak Shaybah. Riyadh telah beberapa kali mencegat rudal Iran yang diarahkan ke Arab

Saudi. Rudal dan pesawat nirawak Iran juga menyasar Uni Emirat Arab sampai Kuwait.

Rabu kemarin, Kuwait menjatuhkan delapan pesawat nirawak. UEA menjatuhkan dua pesawat nirawak di dekat Bandara Dubai. "Mengakibatkan cedera ringan 2 warga Ghana, 1 warga Bangladesh, juga 1 warga India," sebut kantor media Dubai.

## Keselamatan jemaah

Irfan menyebut, situasi di kawasan Timur Tengah masih dinamis dan butuh pemantauan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah menyusun beberapa skenario penyelenggaraan ibadah haji. "Prinsip utama adalah

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

## Skenario Keberangkatan Haji Imbas Perang Iran

### Deskripsi

Tetap berangkat dengan catatan Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.

• Pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik. Menggunakan jalur via Samudra Hindia dan jalur udara Afrika Timur.

• Waktu tempuh lebih lama. Pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus transit di negara ketiga dan berakibat pada penambahan anggaran.

### Dampak/Konsekuensi

Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji, tetapi Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan haji.

- Mempertimbangkan keselamatan jemaah.
- Negosiasi dengan Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor tidak hangus, dapat digunakan untuk 2027, dan tanpa penalti.
- Jika terjadi penolakan negosiasi, jemaah akan mendapatkan opsi untuk menarik pelunasan biaya haji tanpa kehilangan kesempatan berangkat pada 2027.
- Tetap membiarkan dana setelah lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu.



Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah karena situasi tidak terkendali.

- Arab Saudi menutup penyelenggaraan haji.
- Penyelamatan dana layanan yang telanjur dibayarkan.
- Jemaah yang telah lunas membayar biaya haji mendapat prioritas untuk diberangkatkan 2027.
- Memperpanjang waktu antrean ibadah haji.

Sumber: Kementerian Haji dan Umrah, Kemenag, BPS, dan Pemberitaan Kompas, Diolah Litbang Kompas/EDR

INFORMASI: ISMAWATI

## RI Siapkan Mitigasi

(Sambungan dari halaman 1)

menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," katanya.

Skenario itu, antara lain, jemaah haji tetap berangkat meski ada konflik. Hal ini dengan catatan Arab Saudi tetap mengizinkan penyelenggaraan haji bagi jemaah dari luar Arab Saudi. Sesuai jadwal, kloter pertama jemaah haji berangkat pada 22 April.

Untuk skenario itu, disiapkan pengalihan rute yang menjauhi zona konflik. Penerbangan haji tidak melalui wilayah udara Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, hingga Suriah.

Indonesia akan menggunakan rute lebih ke selatan. Pesawat akan terbang di atas Samudra Hindia, lalu ke pesisir timur Afrika. Dijajaki pula jalur lain yang lebih aman.

"Dampak dari pengalihan rute ini, antara lain, waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan *technical landing* di negara ketiga dan tentu akan berakibat pada penambahan anggaran," kata Irfan.

Berdasarkan komunikasi dengan Arab Saudi, protokol evakuasi darurat telah disiapkan. Protokol itu termasuk premi asuransi khusus terkait penambahan komponen risiko perang. Pengadaan stok pangan dan obat-obatan pun harus dilakukan di awal musim untuk menghindari kelangkaan akibat blokade di jalur distribusi laut.

### Skenario penundaan

Skenario kedua, lanjut Irfan, Indonesia tidak memberangkatkan jemaah meski Arab Saudi tetap mengizinkan penyelenggaraan haji tahun ini. Langkah ini demi keselamatan jemaah.

"Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lainnya yang batal digunakan tidak hangus, tetapi dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti," ujar Irfan.

Namun, jika terjadi penolakan atas skenario itu, Indonesia mengantisipasi dengan upaya mitigasi, pengembalian dana, dan penataan investasi. Jemaah haji akan mendapatkan opsi untuk menarik kembali biaya penulisan biaya perjalanan ibadah haji (BPJH) tanpa kehilangan kesempatan berangkat di tahun berikutnya. Opsi lainnya tetap membiarkan dana setelah lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu.

Dalam upaya manajemen psikologi massa, Kementerian Haji dan Umrah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa atau penjelasan *syar'at* mengenai kemampuan (*al-ithminah*) dari sisi keamanan. Hal itu untuk menjelaskan pembatasan demi nyawa adalah wajib secara agama.

Adapun skenario ketiga, kata Irfan, mengantisipasi Arab Saudi memutuskan tak ada penyelenggaraan haji tahun ini. "Terhadap skenario ini, kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telanjur dibayarkan," ucapnya.

Jika penyelenggaraan haji 2026 dibatalkan, jemaah haji yang telah lunas membayar BPJH akan mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan tahun depan. Penundaan penyelenggaraan haji dapat memperpanjang waktu antrean jemaah haji.

"Inti mitigasi 2026, keselamatan jemaah di atas segalanya. Kementerian Haji dan Umrah akan bertindak sebagai navigator risiko yang memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data intelijen keamanan dan prinsip perlindungan warga negara yang absah," ujar Irfan.

Ia mengatakan, pada 28 Februari 2026 terdapat 58.873 anggota jemaah umrah yang berada di Arab Saudi. Dari semua anggota jemaah tersebut, sebagian sudah bisa kembali ke Tanah Air dengan menggunakan penerbangan langsung. Sebagian lain belum kembali karena masih melakukan ibadah umrah.

"Sejak 28 Februari 2026, Kementerian Haji dan Umrah terus mengimbau agar PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) dan jemaah umrah yang belum berangkat dapat menunda untuk sementara keberangkatannya hingga suasana kondusif. Pertimbangan kami adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah," kata Irfan.

Hingga 9 Maret 2026, ada 20.581 anggota jemaah umrah yang telah dipulangkan ke Tanah Air. Namun, di saat yang bersamaan, masih ada keberangkatan 2.000-3.000 anggota jemaah umrah per hari yang menggunakan penerbangan langsung.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P, Selly Andriany Gantina, mengatakan, pemerintah diharapkan juga dapat menyusun skenario darurat untuk jemaah haji khusus. Dari 221.000 anggota jemaah haji 2026, terdapat lebih dari 17.000 anggota jemaah haji khusus. "Jemaah haji khusus ini, kan, penerbangan mereka yang menentukan sendiri, bagaimana skenario terburuknya," ucapnya.

(AP/AF/REUTERS/  
LSA/TAQ/SYA)